

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia Merupakan Negara Kepulauan yang sangat luas dan mempunyai jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota otonom. Secara teknis, kabupaten dan kota mempunyai level yang sama dalam pemerintahan. Pembagian tersebut berdasarkan atas apakah administrasi pemerintahan berlokasi di wilayah pedesaan atau di wilayah perkotaan. di dalam kabupaten dan kota terdapat kecamatan yang merupakan unit pemerintahan administrasi yang lebih kecil. Setiap kecamatan dibagi menjadi desa. Desa di wilayah pedesaan disebut desa, sedangkan wilayah perkotaan disebut kelurahan (Kuncoro, 2014). Sebagai sebuah Negara kepulauan yang sangat besar, Indonesia memerlukan sebuah strategi pembangunan nasional dan regional yang sesuai dengan karakter dan keunggulan masing-masing wilayah.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah pada tanggal 1 Januari 2001, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi tersebut, beberapa peraturan Pemerintah sudah pula dikeluarkan. Sejak saat itu, pemerintah dan pembangunan daerah di seluruh Nusantara telah memasuki era baru yaitu era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Sjafrizal, 2014).

Menurut Sjafrizal (2014) Perubahan yang terjadi dengan adanya otonomi daerah pada dasarnya menyangkut dua hal pokok, yaitu: pertama, pemerintah daerah diberikan wewenangan lebih besar dalam melakukan pengelolaan pembangunan (Desentralisasi Pembangunan). Kedua, pemerintah daerah diberikan sumber keuangan baru dan

kewenangan pengelolaan keuangan yang lebih besar (Desentralisasi Fiskal). Kesemuanya ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat lebih diperdayakan dan dapat melakukan kreasi dan terobosan baru dalam rangka mendorong proses pembangunan di daerah masing-masing sesuai potensi dan aspirasi masyarakat daerah bersangkutan. Hal ini berarti daerah harus lebih mampu menetapkan skala prioritas yang tepat untuk memanfaatkan potensi daerahnya masing-masing.

Kabupaten Halmahera Selatan, merupakan salah satu dari 10 kabupaten/kota. yang ada di Maluku Utara. Yang terbentuk atas diberlakukannya kebijakan otonomi daerah.oleh karena itu pula, kabupaten Halmahera selatan dapat di katakana kabupaten yang baru, karena kabupaten ini di resmikan pada tahun 2003.

Sebagai Kabupaten yang tergolong baru berdiri, tentunya akan sangat diperlukan perencanaan pembangunan wilayah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, konsep wilayah pembangunan dapat diterapkan di Kabupaten Halmahera selatan untuk membantu diperolehnya kebijakan pembangunan wilayah yang efektif dan efisien sesuai dengan permasalahan, dan potensi yang ada di daerah kabupaten Halmahera Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten halmahera selatan 2016-2021. Memperhatikan prioritas rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten halmahera selatan Tahun 2016-2021, tersirat dalam setiap tahapan pembangunan, tema sentral rencana pembangunan jangka menengah daerah, yaitu tema RPJMD periode 2016-2021 adalah peningkatan daya saing daerah. untuk itu dalam RKPD Tahun 2017 sebagai bagian dari RPJMD periode 2016-2021 akan fokus pada peningkatan indeks pembangunan manusia kabupaten halmahera selatan yang masih dibawah rata-rata provinsi maluku utara atau nasional termasuk pemenuhan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), pemantapan pelayanan dasar, percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi dan pemasaran komoditi unggulan halmahera

selatan, peningkatan kualitas lingkungan hidup serta reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan, dengan demikian diharapkan akan berdampak pada peningkatan daya saing daerah.

Rencana kerja pemerintah daerah. (RKPD) Kabupaten Halmahera selatan dengan melihat Potensi pengembangan wilayah, Halmahera Selatan dapat dikembangkan sebagai pusat kegiatan dan kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan, dan lain-lain dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

1. Potensi pengembangan wilayah berdasarkan struktur ruang meliputi : Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu kawasan perkotaan Labuha di Pulau Bacan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kawasan perkotaan Guruapin, Maffa, Saketa dan Babang. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu kawasan perkotaan Laiwui, Loleo Jaya, Kukupang dan Waikyon. Pusat Pelayanan Lokal (PPL) di 21 kecamatan.
2. Sedangkan potensi pengembangan wilayah berdasarkan pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Lindung di Kabupaten Halmahera Selatan terdiri atas Kawasan hutan lindung, Kawasan resapan air, dan Kawasan suaka alam. Sedangkan Kawasan Budidaya terdiri atas Kawasan hutan produksi tetap, Kawasan hutan produksi terbatas, Kawasan pertanian lahan basah, Kawasan pertanian lahan kering, Kawasan perkebunan, Kawasan peternakan, Kawasan perikanan (minapolitan, perikanan tangkap, budidaya perikanan), Kawasan pertambangan, Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, Kawasan pertambangan panas bumi, Kawasan industri, Kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Kawasan peruntukan lainnya.

Sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di Halmahera Selatan, maka dalam RPJMD kabupaten halmahera selatan tahun 2016-2021 ditetapkan Visi dan Misi pembangunan daerah. Untuk merealisasikan Visi dan Misi tersebut,

maka dirumuskan tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran strategis dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas.

Perkembangan ekonomi wilayah yang terjadi terhadap pertumbuhan pendapatan masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan dalam perkembangannya terjadi perubahan yang cukup baik ini digambarkan melalui hasil produksi yang dicapai oleh masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk yang ada, namun dalam kenyataannya belum dikelola secara efektif dan efisien. Kondisi inilah membutuhkan suatu kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan. Maka judul penelitian ini adalah **“ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat di rumuskan permasalahan yg terjadi yaitu:

1. Bagaimana mengetahui potensi-potensi apa saja yang dapat dikembangkan di wilayah kabupaten Halmahera selatan.
2. Bagaimana mengetahui pertumbuhan ekonomi kabupaten Halmahera selatan.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui potensi-potensi apa saja yang dapat di kembangkan di kabupaten Halmahera selatan.
2. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi kabupaten Halmahera selatan.

1.7. Manfaat Penelitian.

Adapun Kegunaan hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber inspirasi, informasi dan pedoman bagi pengambilan kebijakan serta peneliti yang berminat di bidang yang sama

1. Dalam Peneliti ini di harapkan pada pembuat rencana kebijakan strategi pembangunan wilayah yang berdasarkan potensi ekonomi daerah yang ada, di wilayah kabupaten Halmahera selatan dapat di manfaatkan dan memudahkan pemerintah untuk melakukan kebijakan tersebut.
2. Sebagai Bahan Informasi untuk dapat dipertimbangkan oleh pemerintah kabupaten Halmahera selatan.